

**PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA, KEMISKINAN
DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAMBI**

Oleh :

Kamal Idris, Syaparuddin, Siti Hodijah

(Alumni Dan Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas dan Bisnis Ekonomi-Universitas Jambi)

Abstract

Economic Growth, Work Opportunity, Poverty and Income Inequality in Regencies of Jambi, like: Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat and Bungo. This thesis aims to (1) Identify and analyze economic growth, work opportunity, poverty and income inequality (2) determine and analyze economic growth influence towards work opportunity, poverty and income inequality in Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat and Bungo in Regencies of Jambi. This research use quantitative analyze, processed using Eviews4 Program.

The result of this research show that the average of economic growth in Sarolangun and Bungo is higher than economic growth in Jambi. The other side, the average of economic growth in Merangin, Muaro Jambi and Tanjung Jabung Barat lower than the average of economic growth in Jambi. Economic Growth has positive good influence towards work opportunity and has negative influence towards income inequality in Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat and Bungo in Regencies of Jambi.

Keywords : Economic Growth, Work Opportunity, Poverty, and Income Inequality.

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor (Arsyad: 1992). Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefenisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan *Gross National Product* yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. (Todaro: 2004).

Artinya tujuan pembangunan suatu Negara boleh dikatakan tidak berhasil apabila tidak dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan pendapatan serta menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya.

Lebih lanjut Todaro menyatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan atau *poverty line* (Tambunan: 2001).

Setiap pemerintah yang berada di suatu negara berfungsi sebagai *agent of development*, output yang diharapkan adalah agar rakyat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan dapat mencapai kemakmuran atau kehidupan yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses pembangunan ekonomi. Sukses tidaknya proses pembangunan ekonomi yang dilakukan akan menentukan tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya.

Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah pro-poor (Nizar dkk: 2013).

Menurut Tambunan (2001), besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor, diantaranya; pertumbuhan output, tingkat upah dan harga-harga dari faktor produksi lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja, dimana melalui mekanisme pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran, di pasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga (gaji). Apabila permintaan konsumsi rumah tangga di pasar barang meningkat dan terjadilah pertumbuhan output, apabila disemua pasar terjadi peningkatan output, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja.

Dinamika perkembangan perekonomian propinsi Jambi adalah dinamika yang terdiri dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua unsur pelaku ekonomi pada semua strata dan wilayah yang ada di propinsi Jambi. Artinya fenomena adanya keterkaitan positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan kesempatan kerja dalam skala yang lebih rendah dapat terjadi di beberapa kabupaten yang ada di propinsi Jambi atau mungkin juga tidak terjadi untuk beberapa kabupaten/kota tertentu yang ada di propinsi Jambi.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2004), mengungkapkan bahwa inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi,

yaitu : (a) Pertumbuhan output (GDP) total, dan (b) Pertumbuhan Penduduk.

Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan sepenuhnya. Sumber daya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Smith dalam Sukirno (2006), berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggalkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut.

Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan di antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggalkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Menurut Smith, apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa kemasa, yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak serta menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi (pembaharuan). Maka, perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan dengan demikian dari masa ke masa

pendapatan per kapita akan terus bertambah tinggi.

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud disini adalah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu.

Esmara (1986), mengatakan bahwa kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan; semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja. Sedangkan Sagir (1994), memberi pengertian kesempatan kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dari kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan Sukirno (2000), memberikan pengertian kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan.

Swasono dan Sulityaningsih (1993), memberi pengertian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja yang datang misalnya dari perusahaan swasta atau BUMN dan departemen-departemen pemerintah. Adanya kebutuhan tersebut berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Dengan demikian kesempatan kerja (*employment*), yaitu kesempatan kerja yang sudah diduduki.

Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Selanjutnya Bappenas (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability*) dan pendekatan *objective* dan *subjective*. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmapuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum,

antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan. Indek Perkepala (*head count index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu (Bahrun 2014).

Ketimpangan Pendapatan

Menurut Koncoro (2004), menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonom baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan

pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah.

Selanjutnya menurut Kuncoro (2013), bahwa ketimpangan pendapatan dalam praktik sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi dimana-mana. Misalnya di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah tinggal diperumahan mewah. Tak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja Pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton sehingga mendorong munculnya kecemburuan sosial, kesenjangan, dan berujung pada tindak kekerasan.

Menurut Ademan dan Moris dalam Arsyad (2004),

yaitu : (a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Menurut Jantti (1997) dan Mule (1998) dan Tambunan (2001) dalam Hariadi dkk (2013), bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum kaya dan kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu kecenderungan yang meningkat selama dekade 1970-an dan 1980-an. Berdasarkan studi Jantti disimpulkan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya andil pendapatan dari istri di dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesempatan Kerja

Dalam teori Adam Smith (1729-1790), melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) pertumbuhan ekonomi.

Teori Keynes, mengatakan bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga.

Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas *marjinal labor (marginal value of productivity of labor)* yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang

ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

Secara makro transformasi struktural ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) tidak diikuti transformasi penyerapan tenaga kerja. Manurung (2001) menyatakan bahwa di negara berkembang tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan sektor tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja yang akan meningkatkan output. Hal ini tergantung dari seberapa cepat larinya *The Law Dimishing Return (TDRL)*, sedangkan cepat lambatnya TDRL sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan keterkaitan teknologi produksi. Selama sejalan antara tenaga kerja dan teknologi, maka penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan pada

saat terjadi pertumbuhan ekonomi disisi lain akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Menurut Kuznets, menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif. Sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya menurut Kuznets, mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur

berkurang.

Menurut Deni (2008) , mengatakan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah pro-poor (Kraay, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Datrini dalam Nizar dkk (2013), menjelaskan bahwa elastisnya secara absolut adalah kurang dari satu atau bersifat inelastis artinya pertumbuhan ekonomi tidak dengan serta merta akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Nizar dkk meneliti pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, diperoleh hasil menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil

namun hubungannya negatif dan signifikan.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Menurut Arsyad (1997), mengatakan bahwa banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang sebagaimana tersebut diatas, juga di hadapi oleh Indonesia, masalah besar tersebut adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Data Dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara

sedang berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada satu korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat ketimpangan/kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi Pertumbuhan ekonomi (PDB) atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dengan kau kaya.

Studi Ahuja (1997) dalam Hariadi (2013), mengenai negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama periode 1970-an dan 1980-an, pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi (*Asian miracle*). Pada awal dekade 1990-an, ketimpangan pendapan di negara-negara tersebut mulai membesar kembali. Pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak. Bahkan pertumbuhan GNP per kapita di beberapa negara sedang berkembang, seperti Pakistan, India, Kenya dan lain-lain telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup orang miskin di perkotaan dan pedesaan.

Apa yang disebut proses penetasan ke bawah (*trickle down effect*) dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi aorang miskin tidak terjadi.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data deret waktu (*time-series data*), periode 2008-2012 dan data deret lintang (*cross-section data*) yang meliputi 5 Kabupaten di Propinsi Jambi. Data bersumber dari berbagai institusi pemerintah terutama Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten dan Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

3.2. Metode Analisis Data

Guna menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat digunakan analisis regresi sederhana dengan Panel Data. Adapun formulasinya sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \mu_{it}$$

Dimana :

Y = Kesempatan kerja/Kemiskinan/
Ketimpangan Pendapatan

X = Pertumbuhan ekonomi

i = cross section

μ = error term

t = time series

3.3. Pengujian Hipotesis

Uji t

Untuk menguji apakah secara individu masing-masing variabel independent berpengaruh dapat digunakan uji t. Nilai “ t ” hitung (t test) diperoleh dengan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana :

β_i = Koefisien regresi hasil estimasi

Se (β_i) = Simpangan baku β_i

Kriteria pengujian :

Bila nilai $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$ maka hipotesa nol ditolak.

Bila nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka hipotesa nol diterima.

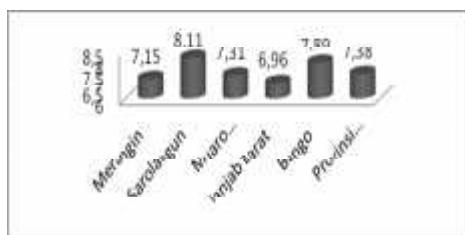
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan, ketimpangan pendapatan di Propinsi Jambi.

5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan dengan migas pada lima kabupaten selama kurun waktu 2008 hingga 2012, terjadi variasi dimana pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Bungo sebesar 11,13% dan terendah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,22%. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Merangin sebesar 8,42% dan terendah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo masing-masing sebesar 6,39%, Kemudian pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Kabupaten Sarolangun sebesar 7,82% dan terendah pada Kabupaten Merangin sebesar 6,47%. (Tabel 5.1 Terlampir)

Jika dilihat pada tabel 5.1. pertumbuhan ekonomi perkabupaten maka pertumbuhan yang relatif stabil adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada tahun 2008 sebesar 5,99% terus meningkat sehingga pada tahun 2009 menjadi sebesar 6,39% pada tahun 2010 sebesar 6,87% pada tahun 2011 sebesar 7,85% dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 sebesar 7,69%. Bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2008 sampai 2012, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 8,11%; yang ditopang oleh tingginya laju nilai tambah PDRB sektor pertambangan dan penggalian yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp.90.387,37 juta menjadi Rp.167.504,00 juta pada tahun 2012.



Gambar 5.1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada 5 Kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2008-2012

5.1.2. Kesempatan Kerja

Dilihat dari pertambahan kesempatan kerja perkabupaten maka pertumbuhannya selama 2008-2012 selalu meningkat yaitu Kabupaten Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo, ini memberi indikasi bahwa pembangunan pada kabupaten ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warganya. Sementara Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi dimana tahun 2008 meningkat, tahun 2009 menurun, tahun 2010 meningkat pesat tahun 2011 menurun dan tahun 2012 menurun lagi. Ini menunjukkan Kabupaten Merangin belum mampu melaksanakan pembangunan yang berorientasi penciptaan kesempatan kerja. (Tabel 5.3. Terlampir)

Dilihat pada tabel 5.3. dari rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja, maka Kabupaten Sarolangun yang memiliki rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja tertinggi sebesar 9,031% ini memberi indikasi pada kabupaten ini telah terjadi proses pembangunan yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja di kabupaten ini akan terbuka lebih

besar lagi sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan kesempatan kerja terkecil adalah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 3,608%; hal ini sangat mengkhawatirkan, walau kabupaten ini memiliki kesempatan kerja yang besar, tapi pertumbuhan yang kecil akan berakibat suatu saat tingkat kesempatan kerja akan mengecil bila dibandingkan daerah lain, pemerintah harus lebih hati-hati dalam melakukan pembangunan dan harus yang berorientasi penyerapan kesempatan kerja lebih banyak lagi.

5.1.3. Kemiskinan

Selama tahun 2008 hingga 2011 tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terendah di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara pada tahun 2012 terjadi pergeseran, tingkat kemiskinan tertinggi tetap Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 10,92% dan terendah Kabupaten Bungo 5,55%. Selama periode 2008-2012, kabupaten yang paling berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan adalah Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat dengan penurunan rata-rata selama periode tersebut sebesar 0,628% dan yang kurang berhasil

adalah Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata selama periode tersebut sebesar -0,403%. (Tabel 5.4. Terlampir)

Berdasarkan Tabel 5.4. dapat dilihat bahwa selama periode 2008-2012 semua kabupaten kecuali Muaro Jambi dan Bungo tingkat kemiskinannya mengalami penurunan, namun persentase tingkat kemiskinan di tiga kabupaten tersebut masih lebih besar dibandingkan Kabupaten Muaro Jambi dan Bungo. Bila dilihat dari rata-rata tingkat kemiskinan selama kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2012 tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 11,50%; diikuti Kabupaten Sarolangun sebesar 9,91%; Kabupaten Merangin sebesar 8,40%; Kabupaten Bungo sebesar 5,41%; dan yang terendah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,02%. Ini berarti dari 5 kabupaten yang menjadi objek penelitian Kabupaten Muaro Jambi yang paling rendah tingkat kemiskinannya.

5.1.3. Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan dapat digunakan nilai ratio gini sebagai gambaran penyebaran pertumbuhan

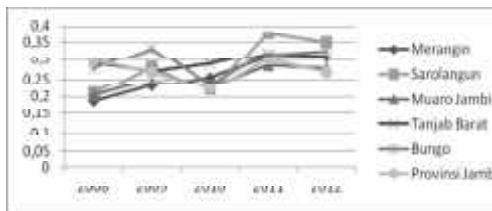
ekonomi apakah telah terjadi pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan. Gini ratio dari 5 kabupaten sebagaimana tersaji pada table 5.5 gini ratio tertinggi pada tahun 2008 berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat (0,293), dan yang memiliki gini ratio terendah Kabupaten Merangin (0,189), untuk tahun 2009 gini ratio tertinggi Kabupaten Bungo (0,334) dan terendah Kabupaten Merangin (0,227), pada tahun 2010 gini ratio tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (0,288), dan yang memiliki gini ratio terendah Kabupaten Sarolangun (0,220), tahun 2011 gini ratio tertinggi Kabupaten Sarolangun (0,373) dan terendah Kabupaten Muaro Jambi (0,286). Pada tahun 2012 gini ratio tertinggi Kabupaten Sarolangun (0,350) dan terendah Kabupaten Muaro Jambi (0,279). (Tabel 5.5. Terlampir)

Jika dilihat pada tabel 5.5 gini rasio perkabupaten selama kurun waktu 2008 sampai 2012 seluruh kabupaten nilai gini ratio selalu mengalami peningkatan, ini menunjukkan pembangunan yang dilakukan daerah tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, malah sebaliknya ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin tinggi.

Salah satu penyebabnya adalah dalam proses prinsip teori pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat dari luar kabupaten, atau tidak dapat dimanfaatkan masyarakat di kabupaten tersebut, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah sehingga sebagian keuntungan yang diraih dibawa oleh pemilik modal keluar kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak membawa pemerataan pendapatan masyarakat dalam kabupaten tersebut.

Jika dilihat dari rata-rata ratio gini selama tahun 2008 hingga tahun 2012 maka ratio gini tertinggi pada Kabupaten Sarolangun sebesar 0,3008; ini artinya Kabupaten Saerolangun yang memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi diantara 5 kabupaten di Provinsi Jambi, diikuti Kabupaten Bungo sebesar 0,2994; Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,2974; Kabupaten Merangin sebesar 0,2568 dan terendah ketimpangan pendapatannya berada pada Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,2488.

Hal ini menunjukkan di Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik diantara 5 kabupaten di Provinsi Jambi. Adalah suatu bukti bahwa Kabupaten Sarolangun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuznets melalui kurva U terbaliknya yang menyatakan bahwa pada awal pembangunan pada suatu negara atau wilayah ditandai oleh ketimpangan yang tinggi hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Kabupaten Sarolangun adalah daerah otonomi baru yang sedang berkembang.



Gambar 5.4. Nilai Gini Rasio pada 5 Kabupaten di Provinsi Jambi

5.2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan Kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penyerapan

kesempatan kerja, untuk itu di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada daerah tersebut. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja pada 5 kabupaten sampel penelitian dapat dilihat dari koefisien regresi, dari hasil olah data dengan program Eviews diperoleh hasil koefisien regresi 3478.647 yang artinya setiap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menambah kesempatan kerja sebesar 3.479 orang.

$$\text{Merangin} \quad \text{EMP} = 97231,67 + 3478,647 \text{ EG} \quad (1.176843)^{\text{ns}}$$

$$\text{Sarolangun} \quad \text{EMP} = 66451,81 + 3478,647 \text{ EG} \quad (1.176843)^{\text{ns}}$$

$$\text{Bungo} \quad \text{EMP} = 102594,4 + 3478,647 \text{ EG} \quad (1.176843)^{\text{ns}}$$

$$\text{Muaro Jambi} \quad \text{EMP} = 113762,3 + 3478,647 \text{ EG} \quad (1.176843)^{\text{ns}}$$

$$\text{Tanjung Barat} \quad \text{EMP} = 103348,6 + 3478,647 \text{ EG} \quad (1.176843)^{\text{ns}}$$

Keterangan :

Ns = non significant

Berdasarkan persamaan regresi panel masing-masing Kabupaten dapat diinterpretasikan bahwa jika tidak ada pertumbuhan ekonomi,

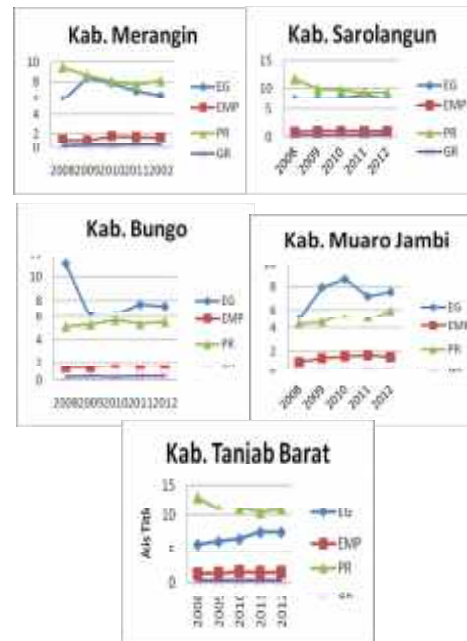
maka gini rasio di masing masing kabupaten adalah Merangin sebesar 0,194; Sarolangun sebesar 0,237. Bungo sebesar 0,237. Muaro Jambi sebesar 0,191 dan Tanjung Jabug Barat sebesar 0,243. Nilai t hitung sebesar 1.169467 menunjukkan tidak satupun dari lima Kabupaten pengaruh pertumbuhan ekonominya berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan sesuai dengan hasil penelitian Bourguignon & Morisson (1990) serta Papanek dan Kyn (1986). Yang menyatakan tidak hanya faktor pertumbuhan ekonomi yg mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor lain yg mempengaruhi adalah tingkat pendidikan tenaga kerja dan struktur produksi suatu daerah.

Adjusted R² adalah 0,95 Hal ini berarti 95% nilai gini rasio di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya 5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

5.5. Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan pembangunan, suatu daerah belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat dilihat pada gambar 5.20.



Gambar 5.20. Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kabupaten yang pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja yaitu Kabupaten Sarolangun, Bungo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Kabupaten yang pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara belum ada kabupaten yang pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Dari lima kabupaten yang lebih ideal adalah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu kabupaten yang tidak berhasil yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi.

V. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi positif dan tidak signifikan.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi,

Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi negatif dan tidak signifikan.

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi positif dan tidak signifikan.

Saran

1. Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan hendaknya membuka daerah ekonomi baru yang berorientasi usaha padat karya, sehingga dapat menyerap lebih banyak kesempatan kerja.
2. Pemerintah kabupaten perlu melakukan langkah strategis guna menanggulangi masalah kemiskinan, rencana penanggulangan dapat dilakukan dengan proses identifikasi keluarga miskin dan miskin relatif, memperluas kesempatan kerja yang sesuai dengan spesifikasi kemampuan masyarakat miskin, meningkatkan budaya wirausaha masyarakat melalui pemberian modal kerja bagi sektor-sektor produktif.

3. Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan hendaknya memperhatikan kondisi masyarakatnya, sehingga pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad. Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Bahrin. 2014. *Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun*. Tesis UNJA. Tidak dipublikasikan.
- Datrini, L.K. 2009. *Dampak Investasi dan Tenaga Kerja*
- Esmara, H. 1986. *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Hariadi, P dkk. 2013. *Ketimpangan Distribusi Pendapatan di kabupaten Banyumas . Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal 61 – 70.
- Kraay, A. 2006. *When is Growth Pro-Poor? Evidence From a Panel of Countries*. *Journal of Development Economics*; 80.
- Kuncoro, M. 2013. *Mengurangi Ketimpangan*. Kompas. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Nizar, C dkk 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*. Volume 1.
- Syaparuddin, 2005. *Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia Periode 1998-2002*. Disertasi UNPAD. Tidak Dipublikasi.

- Sagir, S. 1985. Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya, Alumni Bandung.
- Swasono dan Sulistyaningsih 1993. Pengembangan Sumberdaya manusia: Konsepsi Makro Untuk Pelaksanaan di Indonesia. Izufa Gempita. Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan temuan Empiris, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000, Economic Development, Pearson Education Limited. New York.
- Todaro, Michael P (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.

Lampiran :

Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2008-2012 (Persen)

No	Kabupaten	Tahun					Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Merangin	5,99	8,42	7,85	7,02	6,47	7,15
2	Sarolangun	7,86	7,99	8,09	8,80	7,82	8,11
3	Muaro Jambi	5,22	7,95	8,65	7,18	7,55	7,31
4	Tanjab Barat	5,99	6,39	6,87	7,85	7,69	6,96
5	Bungo	11,13	6,39	6,73	7,68	7,51	7,89
6	Provinsi Jambi	7,16	6,39	7,35	8,54	7,44	7,38

Tabel. 5.3. Pertambahan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2008-2012 (persen)

No	Kabupaten	Tahun					Rata Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Merangin	5,23	-4,09	32,10	-2,39	-1,18	5,93
2	Sarolangun	10,64	5,99	26,70	-6,58	8,40	9,03
3	Muaro Jambi	7,72	1,59	11,99	8,68	-11,34	3,61
4	Tanjab Barat	6,35	6,28	20,03	-11,57	2,54	4,73
5	Bungo	9,53	1,64	26,83	-4,65	0,87	6,84
6	Provinsi Jambi	6,77	2,94	16,01	-1,87	-0,79	4,61

Tabel. 5.4. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2008-2012 (Persen)

No	Kabupaten	Tahun					Rata Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	Rata Rata
1	Merangin	9,50	8,65	8,08	7,68	8,09	8,40
2	Sarolangun	11,69	9,85	9,67	9,17	9,18	9,91
3	Muaro Jambi	4,35	4,54	5,29	4,98	5,96	5,02
4	Tanjab Barat	13,43	11,65	11,08	10,43	10,92	11,50
5	Bungo	5,12	5,32	5,70	5,35	5,55	5,41
6	Provinsi Jambi	9,28	8,55	8,40	8,42	8,28	8,59

Tabel. 5.5. Gini Ratio Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2008-2012

No	Kabupaten	Tahun					Rata Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	Rata Rata
1	Merangin	0,189	0,227	0,255	0,306	0,307	0,2568
2	Sarolangun	0,281	0,280	0,220	0,373	0,350	0,3008
3	Muaro Jambi	0,204	0,243	0,232	0,286	0,279	0,2488
4	Tanjab Barat	0,293	0,270	0,288	0,321	0,315	0,2974
5	Bungo	0,278	0,334	0,238	0,319	0,328	0,2994
6	Provinsi Jambi	0,299	0,269	0,223	0,301	0,269	0,272